

PEMBANGUNAN ETOS KREATIF SUMBER DAYA MANUSIA UNTUK MENGEMBANGKAN EKONOMI KREATIF DAN MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2015

Asep Deni Iskandar
Fakultas DKV Universitas Widyatama
ade_ahimsa@yahoo.com

ABSTRACT

Since creative economy was developed by the government in 2009, it is believed that the creative economy will impact on the country's economy. It could be realized by the government that income contribution from economy creative sector in 2013 reached Rp 642 trillion. No wonder Triawan Munaf, chief of Badan Ekonomi Kreatif who was recently installed, stated that creative economy could contribute to country's income much more. The achievement of the country's income in 2013 indeed seemed to be fantastic, but in reality Asean Economic Community 2015 which has been developed got impact on the creative economy itself, including the human resource. Its implementation still gets questions from the society, especially about whether Indonesia would be just a market target with such a various products and human resources from the creative economy sector, and about its capability to be the leader in MAE. It is the firmness of the government, about the policy in creative industry development, required to get a huge role in MAE. In this paper, the writer tried to analyze the role of government in promoting creative spirit of the human resource which would impact on the creative industry development. Creative industry development program would work better, and the doers would have spirit, when the government themselves through Badan Ekonomi Kreatif could develop a conducive working atmosphere.

Key word : *creative industry, the human resource, government.*

1. PENDAHULUAN

Ekonomi kreatif sebenarnya sudah berkembang di masyarakat jauh sebelum dicanangkan oleh Pemerintah pada 2009, bahkan bersamaan dengan pencanangan ekonomi kreatif oleh perdana menteri Inggris Tony Blair pada 1997. Jika kita mau melihat ke belakang, misalnya tahun 1998 pada saat krisis moneter. Di tengah keterpurukan ekonomi yang berakibat terjadinya PHK besar besaran, masyarakat banyak yang mencoba menyelamatkan perekonomiannya melalui upaya berwirausaha dengan cara-cara kreatif. Banyak anak-anak muda di beberapa kota besar seperti Bandung, Yogyakarta, Jakarta dan lain-lain yang mengembangkan kemampuan kreativitasnya untuk bertahan hidup dan mencari uang. Anak-anak muda ini bergerilya mengembangkan usaha tanpa mendapat bantuan dan dukungan dari Pemerintah.

Melalui usaha kreatif, para pengusaha di sektor kreatif justru memberikan kontribusi pada PDB. Berdasarkan data industri kreatif Indonesia tahun 2002-2006 telah menyumbangkan 6,3 persen dari total PDB nasional. Nilai ekspor industri kreatif mencapai Rp. 81,4 triliun dan berkontribusi sebesar 9,13 persen terhadap total ekspor nasional dengan penyerapan tenaga kerja mencapai 5,4 juta orang. Dengan kontribusi yang sangat fantastis ini

wajar jika Pemerintah menjadikan ekonomi kreatif sebagai sumber pemasukan. Bahkan, presiden SBY pada tahun mengeluarkan Inpres nomor 6 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif dan pada 21 Desember 2011, SBY juga mengeluarkan Peraturan Presiden, nomor 92 tahun 2011, yang melahirkan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Pada Pemerintahan sekarang melahirkan Badan Ekonomi Kreatif.

Realitas tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah sejak jaman pemerintahan SBY hanya berupaya mengambil sisi keuntungan yang akan diterima dari sektor industri kreatif. Hal tersebut ditegaskan oleh Triawan Munaf setelah dilantik menjadi ketua Badan Ekonomi Kreatif. Pemerintah sendiri belum serius membangun sektor ekonomi kreatif ke arah yang lebih baik. Pemerintah dengan kebijakannya pada sektor usaha lain ditenggarai telah mematikan usaha ekonomi kreatif itu sendiri. Hal ini tentunya berakibat pada sumber daya manusia kreatif yang telah tumbuh di masyarakat.

Coba lihat dampak buruk akibat kebijakan Pemerintah dengan digulirkannya perdagangan bebas ACFTA (*Asean-China Free Trade Agreement*) pada tahun 2010. ACFTA menjadi titik awal malapetaka, khususnya bagi industri

kreatif terutama usaha kecil dan menengah (UKM) dalam negeri yang mengandalkan pasar lokal. (Maliatul Husna, 2010). Masuknya batik dari negeri China misalnya, justru mematikan para pengusaha batik dalam negeri karena kalah bersaing dengan produk China yang harganya pun sangat murah. Belum usai permasalahan ACFTA, masyarakat pun dihadapkan pada tantangan baru di tahun 2015 ini dengan dimulainya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Sejalan dengan dimulainya MEA maka negeri ini bukan saja menjadi arus bebas lalu lintas barang dan jasa namun sumber daya manusia kreatif di kawasan Asia Tenggara.

Masuknya sumber daya manusia (SDM) di sektor ekonomi kreatif akan berdampak pada pelaku usaha dan sumber daya manusia dalam negeri yang tidak dipersiapkan dengan optimal oleh pemerintah. Hal ini bisa dilihat dari ketidaksiapan pemerintah ketika memberlakukan sertifikasi profesi dalam menghadapi MAE 2015. Sebagai contoh, profesi fotografi, animasi, dan desain grafis masih dalam tahap wacana. Salah seorang fotografer profesional mempertanyakan kapan pelaksanaan sistem sertifikasi bidang fotografi akan dilakukan oleh Pemerintah (wawancara dengan Ray Bachtiar 12 Agustus 2014). Ray menuturkan pengalamannya ketika di Singapura jauh lebih siap karena mereka sudah menerapkan sistem sertifikasi untuk para fotografer.

Peran pemerintah dalam pemberdayaan SDM kreatif menjadi perhatian untuk dikaji berkenaan dengan insan-insan kreatif di negeri ini akan tergeser oleh SDM dari luar negeri. Penelitian ini bertujuan untuk mendorong peran pemerintah dalam hal menangani SDM bukan sekedar memetakan keuntungan yang didapat dari sektor industri kreatif. Hal tersebut sangat penting agar SDM kreatif dapat berkembang dan siap berkompetisi dalam MAE 2015.

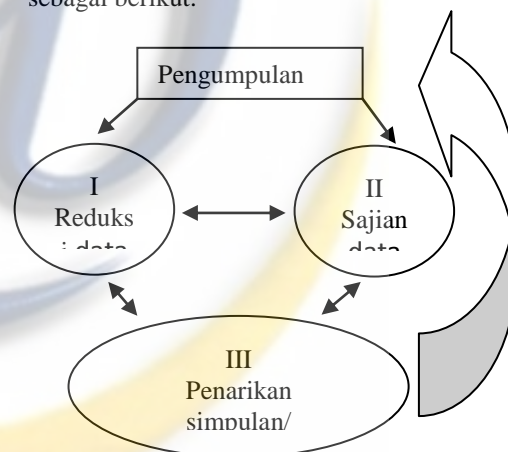
2. MOEL DAN ANALISIS PENELITIAN

Metodologi yang digunakan untuk memperoleh data informasi dan menganalisisnya adalah metode deskriptif kualitatif. Pemilihan metode tersebut dengan maksud memfokuskan pada kualitas yang berkaitan dengan penelitian, sehingga data diperoleh benar-benar akurat. Penelitian kualitatif yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian baik perilaku, motivasi, persepsi maupun tindakannya (Moleong 2008; 6).

Sesuai dengan metode penelitian yang dipilih guna memperoleh data-data informasi, maka

peneliti memanfaatkan sumber kepustakaan, artikel koran, talkshow program acara televisi, dan nara sumber. Pemilihan sumber data tersebut merupakan hal penting dalam melakukan penelitian. Hal tersebut berhubungan dengan ketepatan memilih dan menentukan jenis sumber data sehingga akan didapat kedalaman informasi. Sumber kepustakaan digunakan untuk memperoleh informasi yang relevan dan berkaitan sebagai bahan acuan dalam penelitian. Untuk mendukung penelitian ini sejumlah referensi dijadikan sumber dan rujukan. Sumber data lainnya diperoleh dari dokumen baik tulisan berupa artikel dari surat kabar, pendapat yang dikemukakan nara sumber dari program talkshow di televisi, atau tulisan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan.

Analisis data yang digunakan berupa model analisis interaktif. Rohidi (2011, 240) mengemukakan bahwa di dalam model analisis interaktif terdapat tahapan-tahapan penelitian mulai dari pengumpulan data, reduksi data, sajian data, dan penarikan simpulan yang tidak dapat dipisahkan, berjalan simultan, dan bolak balik. Tahapan penelitian digambarkan dengan skema sebagai berikut.



Gambar 1. Model analisis interaktif
(Sumber : Rohidi, 2011, 240)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketika tahun 1998 *Departement of Culture, Media and Sports* (DCMS) yang dibentuk oleh Tony Blair mempublikasikan hasil pemetaan industri kreatif Inggris, maka seluruh negara di dunia mengikutinya. Dengan kelatahannya, negara Indonesia pun ikut membangun industri kreatif. Seperti halnya di Inggris, pemerintah SBY dalam mengembangkan ekonomi kreatif dengan membentuk *Creative Industry Task Force* melalui kementerian ekonomi kreatif. Kementerian yang dibentuk ini dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang peran industri

kreatif dalam menyumbang perekonomian negara. Hal serupa dilakukan oleh pemerintahan sekarang dengan membentuk Badan Ekonomi Kreatif.

Target pemerintah dalam membangun kesadaran masyarakat dalam mendorong tumbuhnya ekonomi kreatif tentunya sudah tercapai. Kalaulah mau melihat ke belakang, ekonomi kreatif yang digemborkan oleh pemerintah sudah berjalan di masyarakat. Sudah barang tentu kontribusi terhadap PDB yang diharapkan oleh pemerintah sudah tercapai. Berdasarkan data dari Kadin, kontribusi industri kreatif pada 2010 nilai PDB mencapai Rp 185 triliun. Jumlah PDB terus meningkat seiring dengan rata-rata pertumbuhan 5% per tahun. Jika diakumulasi, capaian PDB dalam kurun waktu 2010 – 2013 mencapai Rp 215 triliun.

Capaian tersebut membuktikan bahwa industri kreatif memiliki kontribusi sangat signifikan terhadap PDB. Dengan capaian tersebut industri kreatif kemudian dijadikan potensi kekuatan ekonomi baru Indonesia. Ketika ancaman krisis global pada 2008, industri kreatif justru menjadi industri yang dapat bertahan. Hal ini dapat kita lihat melalui tabel di bawah ini :

Tabel 1.
Kontribusi industri kreatif terhadap perekonomian Indonesia tahun 2007 - 2010

Indikator	2007	2008	2009	2010 (juni 2010)
PDB konstan (miliar)	145.795	145.239	145.537	157.488
Kontribusi Nasional	7,43%	6,97%	7,04%	7,29%
Nilai Ekspor (miliar)	95.209	114.925	116.651	131.251
Kontribusi terhadap Ekspor Nasional	8,86%	7,52%	10,65%	9,25%
Penyerapan Tenaga Kerja (orang)	7.375.116	7.624.643	8.207.532	8.553.365
Kontribusi Nasional	7,38 %	7,43 %	7,83 %	7,90 %

Sumber : Portal Indonesia Kreatif

Jika melihat data capaian pada tabel, secara ekonomi memiliki potensi yang sangat besar dan berdampak pada pemerintah. Namun, industri kreatif pada sisi lain belum berkembang dengan cukup baik. Salah satu masalah utama hambatannya adalah iklim kondusif mengembangkan usaha industri kreatif. Ketiadaan iklim kondusif yang baik justru diciptakan oleh pemerintah sendiri, misalnya pemerintah tidak tegas dalam membendung arus produk yang datang dari China. Hal tersebut justru menjadi masalah bagi para pengusaha industri kreatif sendiri, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pemerintah bagi sebagian besar pengusaha industri kreatif dipandang hanya berupaya meningkatkan sumber pemasukan bagi PDB. Hendi Rusdian pendiri perusahaan *Fourspeed Metalwerks* mengungkapkan dalam acara program televisi “Ini Talkshow pada 12

Februari 2015”; perhatian Pemerintah terhadap para pelaku usaha industri kreatif dirasakan sangat kurang dalam menangani dan mendukung para seniman dan kreator.

Keseriusan dalam membangun iklim usaha yang kondusif dan ketegasan Pemerintah justru harus lebih ditingkatkan. Keberpihakan pemerintah pada UMKM harus lebih diutamakan ketimbang dari luar negeri. Dengan demikian sumber daya manusia yang kreatif akan terus tumbuh di masyarakat. Jika Pemerintah membiarkan terus iklim yang tidak kondusif, maka akan mematikan sumber daya manusia sebagai para pelaku industri kreatif. Permasalahan pun akan semakin bertambah di tahun 2015 ini seiring dengan dimulainya Masyarakat Ekonomi Asean.

Ketika Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) dideklarasikan oleh para pemimpin negara Asean pada KTT 2003 di Bali dianggap menjadi tonggak sejarah bagi perekonomian negara-negara Asean. Namun, hal tersebut justru menjadi pertanyaan siapkah negeri ini masuk dalam kisaran MAE. Pemerintah seharusnya sejak dini sudah mempersiapkan infrastruktur termasuk di dalamnya peningkatan sumber daya manusia (SDM). SDM menjadi penting diperhatikan karena sejak digulirkan ACFTA (*Asean-China Free Trade Agreement*) pada 2010 telah menjadikan persaingan pada tenaga kerja. Persaingan akan semakin ketat dengan dimulainya MEA pada 2015. Para tenaga kerja dan pengusaha di bidang industri kreatif akan menembus batas-batas teritori suatu negara.

MAE sudah dipelupuk mata, namun seiring berjalannya waktu perhatian pemerintah akan pembentukan kuantitas dan kualitas SDM kreatif dirasakan berjalan lambat. Hal tersebut dapat dilihat misalnya pada pemberlakuan Kompetensi Keahlian Nasional Indonesia (KKNI) dan sertifikasi profesi bagi SDM di sektor industri kreatif. Aspek kompetensi SDM yang diukur pada sembilan level kompetensi sesuai KKNI, menjadi salah satu yang sangat penting bagi individu untuk masuk pasar kerja global. Para lulusan perguruan tinggi tidak serta merta dapat menjadi dan diakui sebagai kreator atau pekerja profesional. Sementara, kurikulum perguruan tinggi berbasis KKNI mulai ramai diperbincangkan pada pertengahan tahun 2014. Berbeda halnya dengan negara-negara lain yang sudah mempersiapkan SDM kreatif sejak dini, misalnya dengan memberikan sertifikat profesi untuk pemenuhan SDM di industri kreatif.

Sertifikasi profesi bagi insan-insan kreatif sampai hari ini pun masih dalam tahap persiapan. Sejak 2010 Asosiasi Desain Grafis Indonesia

(ADGI) sampai sekarang belum dapat merampungkan berdirinya Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) seperti yang dipersyaratkan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Bidang lainnya seperti fotografi mengalami hal yang sama. Berdasarkan pemaparan Riadi sebagai ketua Asosiasi Profesi Fotografi Indonesia (APFI), "Saat ini LSP bidang fotografi masih dalam tahap persiapan dan sedang diurus kelengkapan administrasinya." Hal serupa dilakukan oleh para pelaku atau profesi di bidang animasi. Riadi mengungkapkan bahwa rencana pembentukan LSP bidang fotografi, animasi, dan desain grafis, baru dibicarakan pada 12-13 Februari 2015 bertempat di wisma P4TK Bogor.

Pendirian LSP pun ternyata bukanlah perkara yang gampang. Berdasarkan peraturan BNSP, LSP haruslah didirikan oleh asosiasi profesi dan asosiasi industri. Asosiasi yang didirikan pun harus mempunyai kepengurusan wilayah kerja di setiap provinsi di wilayah Indonesia minimal 14 provinsi. Dalam hal mencari dukungan dari 14 provinsi dan menyamakan visi terbentuknya asosiasi dibutuhkan waktu dan biaya yang besar. Persyaratan lain berhubungan dengan permasalahan administrasi minimal asosiasi ini harus berbadan hukum.

Masalah yang dihadapi dalam membentuk LSP adalah sosialisasi dari pemerintah sendiri akan pentingnya sertifikasi profesi. Permasalahan lainnya perumusan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) sebagai acuan dalam membentuk SDM berkualitas dan penentuan level kompetensi baru dibuat pada tahun 2014. Pemerintah di tahun 2015 melalui BNSP memberikan anggaran Rp. 165 miliar untuk percepatan sertifikasi Anggaran yang cukup besar ini diprioritaskan pada sektor agro, otomotif, elektronik, produk karet, perikanan, tekstil, kayu, penerbangan, jasa dalam jaringan, pariwisata, kesehatan, dan logistik (ketua BNSP Sumarna, Koran Kompas, 11 Februari 2015).

Dengan melihat skala prioritas anggaran untuk sertifikasi profesi dan kesiapan Pemerintah dalam mendorong terbentuknya LSP, tentu hal ini menjadi masalah tersendiri bagi pelaku usaha dan SDM di sektor kreatif. Pada satu sisi Pemerintah mendorong masyarakat untuk terlibat dalam ekonomi kreatif agar PDB meningkat. Namun, di sisi yang lain ketidaksiapan pemerintah sendiri dalam mendorong SDM yang lebih berkualitas. Hal tersebut akan menjadikan iklim usaha di sektor ekonomi kreatif menjadi tidak kondusif.

Pemerintah sendiri sejak 2014 telah

mengeluarkan peraturan tentang keharusan pelaksana proyek-proyek yang menggunakan anggaran dari pemerintah harus menyertakan sertifikat profesi. Syarat menyertakan sertifikat profesi berlaku di semua departemen pemerintahan sampai ke tingkat kelurahan. Negara di Asean seperti Singapura pun telah memberlakukan syarat bagi pelaksana proyek harus memiliki sertifikat profesi.

Ketika Pemerintah dan negara Asean lain memberlakukan sertifikasi untuk semua proyeknya, maka para pelaku usaha kreatif misalnya fotografer, tidak akan mendapatkan proyek. Proyek-proyek pemotretan akan didapatkan oleh para fotografer dari luar negeri yang lebih dulu telah memiliki sertifikat profesi yang diakui secara internasional. Hal ini bertolak belakang dari pernyataan Sumarna yang mengatakan, "jangan sampai tenaga asing masuk begitu saja ke Indonesia".

Pemberlakuan syarat sertifikasi bagi fotografer dialami oleh Ivan Arsiandi sebagai salah satu fotografer di kota Bandung. Ivan menuturkan pengalamannya ketika terlibat dalam proyek dokumentasi revitalisasi monumen dan sejarah perjuangan Jawa Barat.

Ketiadaan sertifikat profesi fotografi berdampak pada pembatalan proyek dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata provinsi Jawa Barat. Hal serupa dialami oleh Andang Iskandar yang mendapatkan proyek pemotretan di negara Singapura. Pemerintah Singapura meminta sertifikat profesi fotografi yang berlaku secara Internasional. Pada akhirnya proyek sendiri batal karena dia tidak bisa melengkapi syarat administrasi berupa selebaran sertifikat. Kalaulah kita telusuri sudah barang tentu pengalaman serupa dapat ditemui di bidang profesi lainnya.

Realitas pengalaman tersebut merupakan gambaran tentang SDM kreatif di negeri ini banyak yang gugur ketika terlibat dalam forum internasional maupun di negerinya sendiri. Para fotografer yang kandas tersebut bukan dikarenakan tidak memiliki standardisasi profesional guna berkompetisi di tingkat dunia. Secara kualitas tentunya karya para fotografer, desainer, animator atau seniman di negeri ini tidak kalah bagus. Mereka kalah dengan para fotografer dan kreator negara lain yang bersertifikat internasional. Melihat dari ketiadaan LSP dan sertifikasi profesi yang masih diperbincangkan, barangkali tidak satupun para fotografer dan kreator di negeri ini mempunyai sertifikat profesi resmi.

Melihat realitas tersebut tentunya para pelaku

di bidang industri kreatif menghadapi persoalan yang cukup rumit. Permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan dengan serta merta. Upaya untuk menjawab permasalahan para pelaku industri kreatif harus lebih diutamakan. Salah satu upaya, masyarakat harus mendorong Pemerintah untuk melakukan percepatan sertifikasi bagi para pelaku industri kreatif. Dengan demikian insan-insan kreatif akan termotivasi dan mempunyai etos kreatif dalam membangun industrasi kreatif. Para pelaku industri kreatif pun sudah barang tentu akan siap menghadapi serbuan SDM kreatif ketika MEA 2015 berjalan.

4. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Masyarakat Ekonomi Asean sebagai bentuk realisasi dari tujuan akhir integrasi ekonomi di kawasan Asia Tenggara akan berjalan. Serbuan para tenaga kerja di sektor industri kreatif akan masuk ke Indonesia. Sudah seharusnya SDM kreatif harus bersiap menghadapi ketatnya persaingan. Ketatnya persaingan tidak hanya berlaku di negeri ini namun di negara Asean lainnya. Dengan digulirkannya MAE merupakan momentum yang baik bagi SDM kreatif karena mempunyai akses yang mudah untuk bekerja di luar negeri.

Momentum tersebut tentunya menjadi kesempatan yang baik, namun pemerintah sebagai penentu kebijakan harus lebih tegas dalam menciptakan iklim kerja dan usaha yang kondusif. Perhatian pemerintah bukan hanya melulu pada persoalan pemasukan yang besar pada PDB. Pemerintah harus memberikan perhatian yang serius pada SDM kreatif dan pelaku usaha industri kreatif. Dengan demikian etos kreatif SDM dalam pengembangan ekonomi kreatif dapat terwujud dan menjadi kebanggaan bangsa.

Jika industri kreatif bisa berkembang dengan baik, maka tidak hanya produk domestik bruto (PDB) yang meningkat, lapangan kerja juga kian terbuka sehingga pengangguran dan kemiskinan dapat diatasi secara bertahap.

DAFTAR PUSTAKA

- [1]. Abdurahman, Sumarna F., 2015. Pada artikel Rp. 165 miliar untuk mempercepat sertifikasi, Koran Kompas, 11 Februari 2015.
- [2]. Baskoro, Arya, 2013. *Peluang, Tantangan, dan Risiko Bagi Indonesia Dengan Adanya Masyarakat Ekonomi Asean*, pada <http://crmsindonesia.org>, diakses pada 21 Februari 2015 pukul 11.57
- [3]. Husna, Maliatul, 2010. *Creative Industries Development Program (CIDP) : Pendampingan Industri Kreatif Berbasis triple Bottom Line Menuju Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015*, pada <http://academia.edu/5740443/Essay-lia>, diakses pada tanggal 9 Februari 2015 pukul 12.45.
- [4]. Moleong, L.J, 2008, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi) Jakarta PT Remaja Roskaday.
- [5]. Rohidi. Tjetjep Rohendi. 2011. *Metodologi Penelitian Seni*. Semarang, Cipta Prima Nusantara.
- [6]. Rusdian, Hendi. 2015. pada acara program televisi net “Ini Talkshow”, tayangan 12 Februari 2015 pukul 19.00 – 21.00.
- [7]. Wibowo. Hastjarjo Boedi, *Dimensi Politis Asosiasi Desainer Grafis Indonesia (ADGI) dalam Pemberdayaan Desain Grafis sebagai Profesi (Industri) dan Disiplin Keilmuan (Akademis)*, pada <http://dgi-indonesia.com>, diakses pada 21 Februari 2015 pukul 12.34.

Nara sumber.

1. Andang Iskandar
2. Ivan Arisandi
3. Riadi Rahardja
4. Ray Bachtiar Drajat